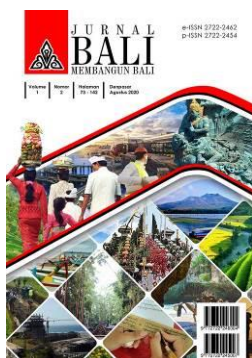




## Menelisk Perkembangan PAD Kabupaten Buleleng Pascapandemi Covid-19

Komang Devi Suartami<sup>1</sup>, Ni Nyoman Juli Nuryani<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, Singaraja  
email: [1komangdevisuartami@gmail.com](mailto:1komangdevisuartami@gmail.com), [2nijuli.nuryani07@gmail.com](mailto:2nijuli.nuryani07@gmail.com)



### Sejarah Artikel

Diterima pada  
4 Juli 2023

Direvisi pada  
27 Juli 2023

Disetujui pada  
14 Agustus 2023

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini dibuat untuk menganalisis bagaimana perkembangan PAD di Kabupaten Buleleng pascapandemi Covid-19.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif yang dikuatkan oleh wawancara dengan mendeskripsikan perkembangan PAD Kabupaten Buleleng pascapandemi berdasarkan penjelasan hasil perhitungan dan wawancara sesuai metodologi yang digunakan.

**Hasil dan Pembahasan:** Perkembangan PAD Kabupaten Buleleng mengalami ketidakstabilan dari tahun 2019-2020 dengan persentase pertumbuhan -12,7% sedangkan di periode pascapandemi tahun 2021 keadaan PAD meningkat 22,9% dengan sektor pajak daerah sebagai sektor penerimaan yang paling dominan. Terdapat kendala dalam pengoptimalan PAD yang berasal dari terjadinya pandemi Covid-19, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengotimalan PAD, dan belum tercapainya jumlah aparatur BPKPD yang memadai.

**Implikasi:** Perlu adanya pemerataan peningkatan sumber penerimaan PAD tersebut melalui: mempertahankan manajemen pengelolaan kas daerah sesuai Peraturan Bupati No 10 Tahun 2021 Bab III Bagian Kesatu Pasal 17, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mencari potensi-potensi baru untuk penerimaan daerah dan melakukan inovasi program yang relevan dilaksanakan, dan menambah jumlah aparatur BPKPD untuk pengelolaan PAD yang optimal.

**Kata kunci:** pendapatan asli daerah, pengelolaan, perkembangan.

### Abstract

**Purpose:** This study is to analyze how the development of PAD in Buleleng Regency after the Covid-19 pandemic

**Research Methods:** This study uses a quantitative descriptive that is supported by interviews which describes the post-pandemic development of PAD in Buleleng Regency based on explanations of the results of calculations and interviews according to the methodology used.

**Findings:** The development of PAD in Buleleng Regency unstable from 2019-2020 with percentage -12.7% while in the post-pandemic period in 2021 PAD increased 22.9% with the local tax sector as the most dominant revenue sector. There are obstacles in optimizing PAD originating from the occurrence of the co-19 pandemic, lack of community participation in optimizing PAD, and lack of BPKPD apparatus.

**Implications:** There is need equity in increasing sources of the PAD revenue, through: maintaining management of regional treasury management accordance with Regent Regulation No. 10 of 2021 Chapter III Part One Article 17, improving services to the community, seeking new potentials for regional revenue and implementing relevant program innovations, and adding BPKPD apparatus for optimal PAD management.

**Keywords:** regional original income, management, development.

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimasukkan dalam pendapatan daerah yang sah, hal itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan PAD yang stabil, dapat memperkuat kemandirian daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang diutamakan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa hasil PAD disetiap daerah tentu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan potensi ekonomi, kebijakan fiskal, dan kondisi sosial-ekonomi di masing-masing daerah.

Seperti halnya Kabupaten Buleleng meskipun sebagai salah satu Kabupaten di Bali yang memiliki wilayah paling besar dengan luas wilayah 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,23%) namun dalam realisasi PAD nya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Buleleng masih belum tergolong sebagai daerah pariwisata yang tinggi, terlihat dari minimnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah ini. Kabupaten Buleleng lebih dikenal sebagai kota pendidikan yang sektor pariwisatanya belum sepenuhnya terjamah wisatawan sehingga hasil PAD yang terealisasi tentu berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi PAD dari BPKPD dari tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 1. Data Target dan Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Periode 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	444.111.759.000	365.596.494.163	82%
2020	335.072.650.874	318.986.891.632	95%
2021	395.236.169.142	391.988.445.424	99%

Sesuai dengan data pada tabel dapat diketahui realisasi pendapatan Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 hingga tahun 2021 diketahui cenderung mengalami fluktuasi dengan nilai pertumbuhan yang terlealisasi terbesar terjadi ditahun 2021 sebesar 99% dan terkecil terjadi di tahun 2019 sebesar 82%, meskipun keadaan realisasi jika dilihat dari prosentasenya bertumbuh dan meningkat, akan tetapi belum ada yang mencapai 100%. Selain itu jika dilihat dikolom target, dari tahun 2019 hingga tahun 2021 target PAD juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Terjadinya penurunan dan peningkatan pada nilai realisasi PAD pada data BPKPD tersebut, tentunya dipicu oleh beberapa aspek, seperti retribusi daerah, pajak daerah maupun

pendapatan daerah lainnya yang sah. Selain itu, keadaan fluktuasi PAD tersebut juga dipicu oleh adanya pandemi Covid-19 sebagaimana yang diketahui Covid-19 masuk ke Indonesia di awal maret 2020 yang menimbulkan banyak dampak, salah satunya berdampak pada penurunan laju perekonomian.

Merosotnya perekonomian di masa pandemi Covid-19 menjadi cerminan mengapa di tahun 2020 PAD mengalami penurunan. Namun di tahun 2021 sesuai pada tabel 1.1 realisasi PAD mengalami peningkatan yang hampir sempurna meskipun masih dalam era pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari sinergi pemerintah dalam mengambil kebijakan, seperti halnya dalam pungutan pajak diberikan kebijakan penghapusan denda pajak serta pemberian diskon pajak yang ternyata mampu mendongkrak capaian target pajak di tahun 2021 sehingga menjadi penyumbang besar dalam realisasi PAD tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sumber PAD mempunyai peran dalam mendongkrak peningkatan PAD.

Mengoptimalkan pendapatan PAD hendaknya dilakukan melalui peningkatan sumber penerimaan PAD. Meningkatnya pendapatan sumber penerimaan PAD tentunya akan membantu perkembangan PAD. Selain itu, memahami kondisi dan kendala yang dialami dalam pengoptimalan PAD akan membantu dalam menghadirkan berbagai solusi dalam peningkatan sumber penerimaan PAD.

Harapannya dengan diketahui bagaimana perkembangan PAD, peran sumber penerimaan PAD yang sifatnya dominan dalam perkembangan PAD dan kendala dalam pengoptimalan PAD akan membantu BPKPD dalam mengoptimalkan realisasi PAD di Kabupaten Buleleng untuk periode-periode selanjutnya. Hasil analisis perkembangan PAD ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sehingga berdampak positif terhadap perkembangan PAD.

## METODE PENELITIAN

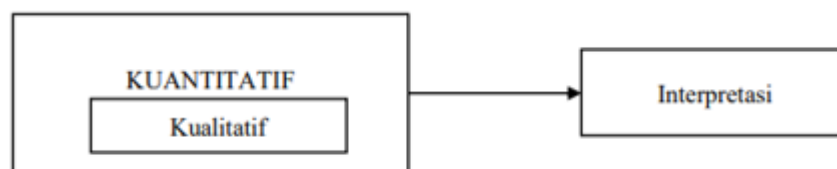
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif yang dikuatkan oleh wawancara, yang mendeskripsikan perkembangan PAD Kabupaten Buleleng pascapandemi berdasarkan penjelasan hasil perhitungan dan wawancara sesuai metodologi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif, yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung berupa angka-angka (Sugiyono, 2016). Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan akun laporan PAD, data yang diambil adalah data laporan PAD dari tahun 2019-2021. Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka dan diperoleh peneliti baik dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Sugiyono, 2016). Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data yang tidak berupa

angka-angka dan tidak dapat dihitung melainkan bersifat keterangan yang diperoleh dari pemimpin maupun karyawan perusahaan, seperti informasi tentang perusahaan maupun PAD pada BPKPD.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh berupa keterangan atau informasi terkait perusahaan, kegiatan BPKPD yang diperoleh peneliti melalui sumber primer atau data yang didapatkan secara langsung tanpa melalui perantara dan data diperoleh secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Sedangkan sumber data sekunder yaitu yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2016). Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen BPKPD berupa laporan PAD tahun 2019-2021.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Teknik dokumentasi dan Teknik wawancara. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang sudah ada. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti berupa laporan PAD tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) dalam pelaksanaannya jenis wawancara semiterstruktur lebih bebas dan tujuannya menemukan permasalahan secara terbuka serta wawancara ini dilakukan guna memperoleh data secara primer mengenai BPKPD dan informasi terkait PAD.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif kuantitatif. Didalam teknik analisis ini data kuantitatif menjadi kajian utama yang dikuatkan dengan data kualitatif berdasarkan hasil wawancara (Creswell, 2014) sebagaimana terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Teknik Analisis Data  
[Sumber: Creswell, 2014]

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa analisis data kuantitatif sebagai metode utama dilengkapi analisis data kualitatif. Pencampuran data kuantitatif dan data kualitatif dilakukan pada bagian yang membutuhkan penegasan, sehingga pemahaman menjadi lebih baik. Dilakukannya wawancara bertujuan untuk memperoleh keakuratan informasi. Adapun analisis data kuantitatif yang dimaksudkan adalah hasil analisis laporan keuangan PAD Tahun 2019-2021 menggunakan rasio perbandingan dan data kualitatif sebagai penegas dari hasil analisis kuantitatif merupakan hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses analisis ini dilakukan perhitungan yang didasarkan pada data mentah yang diperoleh pada laporan PAD Kabupaten Buleleng periode 2019-2021. Berdasarkan hasil perhitungan data didapatkan perkembangan PAD Kabupaten Buleleng pascapandemi Covid-19 sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Buleleng (BPKPD) Periode 2019-2021

Tahun	Sumber	Realisasi	%	PAD (Rp)	%
2019	Pajak Daerah	Rp 155.755.834.812		Rp 365.596.494.163	-
	Retribusi Daerah	Rp 20.319.816.298			
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp 17.168.853.955			
	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 172.351.989.097			
2020	Pajak Daerah	Rp 118.257.303.529	-24%	Rp 318.986.891.632	-12,7
	Retribusi Daerah	Rp 19.809.775.071	-3%		
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp 19.823.539.604	15%		
	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 161.096.273.427	-7%		
2021	Pajak Daerah	Rp 136.710.405.062	16%	Rp 391.988.445.424	22,9
	Retribusi Daerah	Rp 45.478.089.193	130%		
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp 20.040.848.770	1%		
	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 199.081.751.078	24%		

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa PAD merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah yang terdiri atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Hidayat, 2019). Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat perkembangan PAD Kabupaten Buleleng pascapandemi Covid-19 tepatnya periode 2019-2021 mengalami penurunan dan peningkatan. Berdasarkan data tabel 2 dapat diketahui bahwa prosentase perkembangan pendapatan PAD 2019-2020 mengalami penurunan dengan total prosentase penurunan sebesar -12,7 %. Hal ini dikarenakan beberapa sumber penerimaan PAD mengalami penurunan seperti halnya pajak daerah yang mengalami penurunan dengan total prosentase penurunan sebesar -24%, retribusi daerah pada tahun 2019 ke tahun 2020 menurun dengan total

prosentase sebesar -3%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD, meningkat dengan prosentase kenaikan sebesar 15,5%, dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan penerimaan sebesar -7%.

Berdasarkan uraian pendapatan PAD dari tahun 2019 hingga 2020 dapat diketahui pendapatan dari sumber-sumber penerimaan daerah tersebut lebih banyak mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu dari penerimaan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Menurunnya pendapatan PAD di tahun 2020 disebabkan oleh penurunan pendapatan pada komponen penerimaan PAD seperti halnya penurunan penerimaan pada pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, PBB-P2. Selain itu penurunan penerimaan juga terjadi pada retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

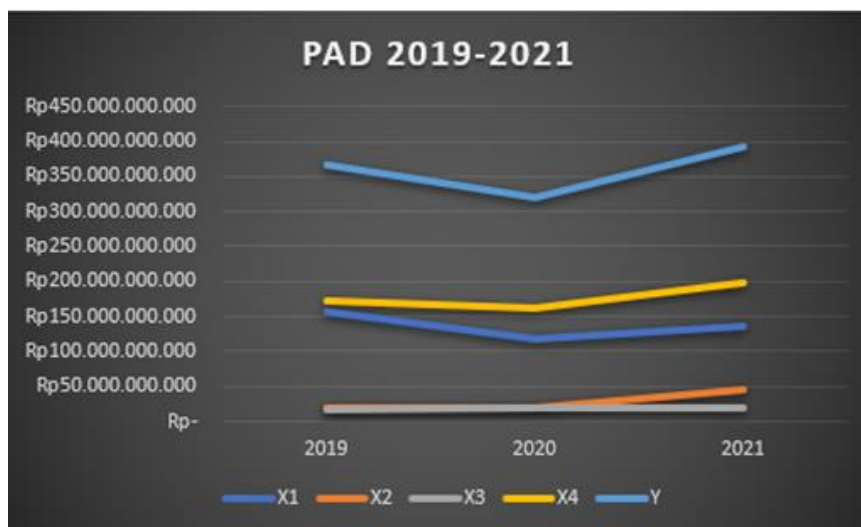
Berdasarkan pemaparan dari kepala bidang penagihan dan evaluasi di BPKPD, Ida Bagus Perang Wijaya menyebutkan bahwa adanya kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab penurunan penerimaan pada komponen-komponen PAD. Adanya kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Buleleng memicu terjadinya gejolak perekonomian yang sangat besar di wilayah Kabupaten Buleleng yang menyebabkan banyak kerugian di tengah masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran akibat PHK, menurunnya pendapatan pengusaha-pengusaha ataupun UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Akibatnya juga berdampak pada penurunan pendapatan PAD Kabupaten Buleleng yang terjadi pada tahun 2020 tersebut.

Menariknya di saat pandemi Covid-19 berdasarkan hasil penelitian menunjukkan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah justru meningkat. Menurut kepala bidang penagihan dan evaluasi di BPKPD, Ida Bagus Perang Wijaya hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami peningkatan di tengah pandemi dikarenakan penerimaannya berasal dari dividen atas penyertaan modal oleh pemerintah di berbagai sektor usaha yang setiap periodenya memang ditargetkan untuk meningkat. Adapun dampak dari penurunan pendapatan PAD di tahun 2020 tersebut pastinya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan, peningkatan pelayanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Pernyataan tersebut turut menguatkan temuan pada penelitian ini bahwa terdapat perbedaan penerimaan PAD tahun 2019 dan tahun 2020.

Sebagaimana pada tabel 2 pendapatan PAD di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,9%. Hal ini terjadi tentunya di dorong oleh peningkatan jumlah pendapatan dari masing-masing sumber penerimaan PAD seperti halnya pajak daerah meningkat 16%, retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 130%, hasil

pengelolaan kekayaan daerah meningkat 1% dan lain-lain PAD yang sah meningkat 24%.

Meningkatnya seluruh sumber penerimaan PAD di tahun 2021 dikarenakan keadaan pandemi berangsur pulih kemudian diterapkan kebijakan era new normal yaitu masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah namun tetap dengan protokol kesehatan. Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak dengan tujuan untuk membantu objek pajak daerah di masa pascapandemi. Harapannya, agar masyarakat tidak terlalu terbebani oleh denda pajak. Hal inipun berimplikasi pada meningkatnya penerimaan pajak daerah meskipun belum sepenuhnya pulih.



Keterangan: Garis warna biru tua X1 (Pajak Daerah)  
 Garis warna orange X2 (Retribusi Daerah)  
 Garis warna abu-abu X3 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah)  
 Garis warna kuning X4 (Pendapatan lain-lain PAD yang sah)  
 Garis warna biru muda Y (PAD).

Gambar 2. Grafik Perkembangan PAD Kabupaten Buleleng (2019-2021)

[Sumber: Laporan Keuangan BPKPD, 2022/Data Diolah]

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa garis berwarna biru muda menunjukkan variabel Y sebagai PAD, terlihat garis kurva mengalami penurunan cukup tajam di titik tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD di Kabupaten Buleleng pascapandemi Covid-19 selama periode tahun 2019-2021 tidak stabil atau mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali meningkat cukup drastis di tahun 2021. Pada garis kurva warna biru tua menunjukkan variabel X1 yaitu pajak daerah, garis kurva berwarna biru tua sebagai pajak daerah tersebut mengalami penurunan dan peningkatan sehingga terlihat garis kurva yang menurun di titik tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021.

Kemudian pada garis kurva warna orange menunjukkan variabel X2 yaitu retribusi daerah, terlihat bahwa garis kurva yang menunjukkan retribusi daerah mengalami penurunan di tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021.

Selanjutnya garis kurva berwarna abu-abu menunjukkan variabel X3 sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah, terlihat pada grafik garis kurva berwarna abu-abu hampir stabil atau tidak menurun, jika dilihat secara seksama garis kurva berwarna abu-abu mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak meningkat secara tajam.

Kemudian garis kurva berwarna kuning menunjukkan variabel X4 sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah, terlihat pada grafik garis kurva berwarna kuning mengalami sedikit penurunan di titik tahun 2020 dan mengalami peningkatan di tahun 2021. Selain itu garis kurva berwarna kuning yang menunjukkan pendapatan lain-lain PAD yang sah terlihat berada paling atas dibandingkan garis kurva yang menunjukkan sumber penerimaan pajak daerah, retribusi daerah ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sangat dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Akan tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bidang penagihan dan evaluasi di BPKPD, Ida Bagus Perang Wijaya bahwa yang menjadi sumber utama PAD adalah pajak daerah, hal ini karena pajak daerah merupakan potensi utama sedangkan untuk PAD lain-lain merupakan sumber penerimaan yang tidak di targetkan dan penerimaannya tidak sepenuhnya masuk ke kas daerah seperti halnya penerimaan BLUD.

Penerimaan BLUD sendiri merupakan pendapatan yang diterima dari sarana kesehatan pemerintah seperti RSUD dan puskesmas, namun di BPKPD hanya dilakukan pencatatannya saja, untuk nominal pendapatannya tidak masuk ke kas daerah karena akan digunakan kembali untuk operasional rumah sakit dan kepentingan publik. sebagaimana isi dari Peraturan Bupati Buleleng No 10 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Bab VI pasal 54 bahwa pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan sesuai ketentuan dan dilakukan melalui RKUD kecuali unit kerja yang berstatus BLUD.

BLUD tidak lagi disetor menjadi kas daerah dan dikelola kembali pada RSUD maupun Puskesmas dikarenakan untuk memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Sehingga pelayanan rumah sakit daerah lebih mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat tanpa ingin mencari keuntungan. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sumber penerimaan PAD yang paling dominan adalah **pajak daerah**.



Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh kepala bidang penagihan dan evaluasi di BPKPD, Ida Bagus Perang Wijaya bahwa meskipun telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya ada beberapa kendala yang masih menjadi hambatan dalam pengoptimalan pendapatan PAD.

Adapun kendala dalam peningkatan PAD itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kendala Utama

- Adanya pandemi Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 di Kabupaten Buleleng memicu terjadinya gejolak perekonomian yang sangat besar di wilayah Kabupaten Buleleng yang menyebabkan banyak kerugian di tengah masyarakat, mulai dari banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran akibat PHK, menurunnya pendapatan pengusaha-pengusaha ataupun UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Akibatnya juga berdampak pada penurunan pendapatan PAD Kabupaten Buleleng yang terjadi pada tahun 2020 tersebut. Terjadinya pandemi yang tidak terduga merusak hampir seluruh tatanan perekonomian di Kabupaten Buleleng sehingga sangat mempengaruhi sumber-sumber penerimaan PAD.

- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengoptimalan pendapatan PAD

Partisipasi masyarakat dalam pengoptimalan pendapatan PAD memicu rendahnya pendapatan PAD. Seperti halnya banyak masyarakat yang membayar pajak tidak tepat waktu, ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari membayar pajak. Sehingga banyak dari masyarakat yang masih enggan membayar pajak tepat waktu. Selain itu, petugas BPKPD juga harus dihadapkan dengan masyarakat yang tidak mampu membayar pajak sehingga petugas terpaksa memberikan relaksasi pajak yang dapat memicu rendahnya pendapatan PAD.

b. Kendala lainnya

- Cakupan wilayah Kabupaten Buleleng dirasa terlalu luas dibandingkan dengan jumlah aparatur yang tersedia sehingga pungutan pajak di setiap daerah menjadi kurang optimal

Berdasarkan uraian kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan PAD tersebut, adapun Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pendapatan PAD di antaranya

1. Mempertahankan manajemen pengelolaan kas daerah dalam hal ini PAD sesuai dengan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2021 tentang manajemen pengelolaan kas Bab III Bagian Kesatu Pasal 17.
2. Apabila terjadi kekurangan jumlah pegawai, maka langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mencari SDM yang diperlukan dengan melakukan perekrutan pegawai kontrak. Penambahan jumlah staf ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan jumlah pegawai yang ada sehingga pengelolaan PAD dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu, pemberian pelatihan berperan penting guna meningkatkan skill dan wawasan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya pelayanan yang baik maka dapat memberikan kepuasan pada masyarakat. Apabila pelayanan yang diberikan berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat maka akan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam mengurus pajak, perizinan dan lainnya. Apabila layanan yang diberikan kurang baik maka, minat masyarakat untuk mengurus pajak, perizinan dan menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah pasti akan menurun. Kualitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat seharusnya terus dievaluasi dan ditingkatkan guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Melakukan upaya untuk meningkatkan hasil pendapatan PAD meskipun dalam masa Pandemi Covid-19 dengan mencari potensi-potensi baru untuk pajak daerah di mana setiap ada pembangunan pusat-pusat bisnis disitu akan muncul potensi baru seperti potensi parkir, restoran, hiburan dan lainnya, dalam artian meningkatnya PAD akan menambah nilai kekayaan daerah yang diperoleh dari potensi daerah itu sendiri (Fadilla & Wafiroh, 2022). Selain itu tidak menjadikan pandemi Covid-19 patokan untuk tidak berinovasi dalam mengoptimalkan PAD. Pada masa Covid-19 justru harusnya dijadikan tempat pemerintah dalam melakukan inovasi pemungutan pajak retribusi serta komponen PAD lainnya yang gencar dilakukan secara online yang mempermudah masyarakat untuk mengakses pungutan pajak secara efisien sehingga harapannya akan meminimalisir kemungkinan pembayaran pajak tidak tepat waktu dan menghindari tidak tercapainya target pendapatan retribusi. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bidang penagihan dan evaluasi di BPKPD, Ida Bagus Perang Wijaya serta mempertahankan

program-program yang menarik untuk masyarakat seperti pembayaran pajak yang lunas secara online akan diberikan sembako dan lainnya.

## SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis perkembangan PAD melalui teknik deskriptif kuantitatif didapat bahwa perkembangan PAD di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan di tahun 2020 dengan prosentase -12,7% akibat pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur membaik setelah pandemi Covid-19 tepatnya di tahun 2021 dengan prosentase 22,9% dan didapati bahwa pajak daerah merupakan komponen penerimaan PAD yang paling dominan di antara komponen penerimaan lainnya.

Terdapat dua jenis kendala dalam pengoptimalan PAD di Kabupaten Buleleng yaitu kendala utama di antaranya terjadinya pandemi Covid-19 dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengotimalan PAD. Kendala lainnya yaitu belum tercapainya jumlah aparatur BPKPD yang memadai, Untuk itu perlu dilakukannya Upaya untuk mencegah terjadinya penurunan PAD di periode berikutnya dengan tetap melaksanakan manajemen pengelolaan kas daerah dalam hal ini PAD sesuai dengan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2021 tentang manajemen pengelolaan kas Bab III Bagian Kesatu Pasal 17, selanjutnya lebih memaksimalkan dalam pelayanan kepada masyarakat dan terus berinovasi untuk mencari potensi-potensi baru untuk sumber-sumber PAD demi menunjang pengoptimalan PAD serta melakukan inovasi program-program yang relevan dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 maupun pascapandemi Covid-19 sebagai upaya dalam pengoptimalan PAD.

## REFERENSI

- Arismayanti, N. K. (2019). Pengembangan Pariwisata Hijau Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemuteran Kabupaten Buleleng Bali. . *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi (Senastek)*, 1–19.
- Berwulo, L. L. (2019). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22-23.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Jakarta: Percetakan Pustaka Pelajar.
- Delia Alfrianty, & Q. (2022). Optimalisasi Potensi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pascapandemi Covid-19 Di Kabupaten Bintan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* , 2(4), 60–72.
- Djafar, J. S. (2022). Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Pertumbuhan Penerimaan afar, J. S. (2022). Analisis Kontribusi, Efektivitas Dan Pertumbuhan Penerimaan

- Kabupaten Tana Toraja. . *Econbank: Journal Of Economics And Banking* , 1–14.
- Fadilla, H. N. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan New Normal. . *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, , 11(1), 78–89. .
- Gunawan, I. &. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) unawan, I., & Suebah, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Manajemen Dan Retail*, 2(1), 54–76.
- Gunawan, K. &. (2021). Covid-19 Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pasar Argha Nayottama Kabupaten Buleleng. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 157–168.
- Hidayat, M. F. (2019). Analisa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2018. *Jurnal Publikasi*, 6(1), 1–8. .
- Horota, P. (2019). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(1), 1–10.
- Jacobs, S. L. (2022). Analisis Pengaruh Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Journal Of Business Application*, 52–63. .
- Mahfudh, S. H. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Bandung: Pusaka Almaida.
- Manawan, V. A. (2023). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Capaian Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Lex Administratum*, 1-8.
- Martini, R. P. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1).
- Nabila, N. &. (2022). Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*,, 1(2), 121–135.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv.
- Yanlik. (2022, November 08). *Penghargaan WTP Kabupaten Buleleng*. Retrieved from Sippn.Menpan: <https://sippn.menpan.go.id/Berita/31364/DinasLingkungan-Hidup/Penghargaan-Wtp-Kabupaten-Buleleng>
- Yanti, N. (2019). Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang. *Jurnal Kbp*, 439–453.